

PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SISKETEM KEUANGAN DESA DI DESA PAGERWOJO, BUDURAN SIDOARJO

Oleh:

Febby Dwi Agustin

Lailul Mursyidah

Program Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2026



Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Konsep E-Government hadir sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Di Indonesia, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik didukung oleh kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan mengintegrasikan sistem elektronik agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik. Dalam konteks pemerintahan desa, salah satu bentuk implementasi E-Government adalah penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai aplikasi pengelolaan keuangan desa. Digitalisasi melalui SISKEUDES diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance.

Pendahuluan

Penampilan Awal Aplikasi Sistem Keuangan Desa (2024)



<https://images.app.goo.gl/cDkDZFhg93DBqRLy9> (2024)

Pendahuluan

Berdasarkan tabel rekapitulasi APBDes Tahun Anggaran 2024-2025, seluruh komponen keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa telah diinput secara lengkap ke dalam aplikasi SISKEUDES di Desa Pagerwojo. Hal ini menunjukkan bahwa sistem digital telah digunakan secara efektif dalam mendukung proses perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Secara administratif, pencatatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sehingga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, meskipun laporan telah terdigitalisasi dan tertib secara sistem, keterbukaan informasi kepada masyarakat masih belum baik karena belum didukung platform publik berbasis digital. Dengan demikian, implementasi SISKEUDES sudah efektif dari sisi tata kelola internal, tetapi masih perlu penguatan pada aspek transparansi eksternal.

Laporan APBDes Tahun Anggaran 2024-2025 Pemerintahan Desa Pagerwojo						
Uraian	2024			2025		
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1. Pendapatan						
Pendapatan Asli Desa	137.800.000,00	131.000.000,00	6.800.000,00	141.000.000,00	-	-
Pendapatan Transfer	2.237.463.721,00	2.318.718.507,00	8.745.214,00	3.002.036.823,00	-	-
Dana Desa	1.084.271.000,00	1.084.471.000,00	200.000,00	-	-	-
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	694.680.779,00	698.020.977,00	3.340.198,00	-	-	-
Alokasi Dana Desa	498.511.942,00	486.226.530,00	12.285.412,00	-	-	-
Bantuan Keuangan Kab/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-	-	-
Pendapatan lain-Lain	170.367.668,00	180.271.434,00	9.903.766,11	88.800.000,00	-	-
Jumlah pendapatan	2.635.631.389,00	2.529.989.941,00	5.641.447,89	3.231.836.823,00	-	-
2. Belanja Desa						
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.367.573.436,40	1.326.907.768,00	40.665.668,40	-	-	-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	473.402.945,00	453.416.000,00	19.986.945,00	-	-	-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	179.645.000,00	174.145.000,00	5.500.000,00	-	-	-
Bidang Pemberdayaan	442.370.000,00	433.370.000,00	9.000.000,00	-	-	-
Bidang Penyelenggaraan Bencan, Darurat Dan Mendesak Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	-	-	-
Belanja Pegawai	-	-	-	836.966.400,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	1.627.208.127,00	-	-
Belanja Modal	-	-	-	657.119.587,00	-	-
Belanja Tak Terduga	-	-	-	180.000.000,00	-	-
Jumlah Belanja	26.429.991.381,40	2.567.838.768,00	75.152.613,40	3.301.294.155,40	-	-
Sirplus/Defisit	-7.359.992,40	-62.151.173,11	-69.511.165,51	(69.457.292,40)	-	-
3. Pembiayaan Desa						
Penerimaan Pembiayaan	7.359.992,40	7.359.992,40	0,00	69.457.292,40	-	-
Pembiayaan Netto	7.359.992,40	7.359.992,40	0,00	69.457.292,40	-	-
SILPA Tahun Sebelumnya	0	69.511.165,51	-69.511.165,51	69.457.292,40	-	-
Sisa lebih Pembiayaan				0,00	-	-

Kondisi Existing

Penelitian ini membahas penerapan E-Government melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Desa Pagerwojo telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sejak tahun 2018 sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan desa. Sebelum menggunakan aplikasi tersebut, pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Word dan Excel yang dinilai kurang efektif, rawan kesalahan pencatatan, serta berpotensi terjadi keterlambatan pelaporan. Setelah penerapan SISKEUDES, proses penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan sesuai regulasi. Laporan APBDes Tahun Anggaran 2024–2025 juga telah diinput secara lengkap melalui aplikasi ini, menunjukkan bahwa secara administratif sistem telah berjalan dengan baik.

Gep Permasalahan

Meskipun penerapan SISKEUDES telah berjalan, masih terdapat beberapa permasalahan. Pertama, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES, terutama bagi perangkat desa yang belum terbiasa dengan teknologi informasi. Kedua, kendala infrastruktur berupa jaringan internet yang tidak stabil sehingga menghambat proses input dan pengelolaan data. Ketiga, transparansi kepada masyarakat belum baik karena desa belum memiliki website atau platform digital resmi sebagai media publikasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan sistem digital secara internal dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah



Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan E-Government melalui aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo serta faktor pendukung dan penghambatnya berdasarkan indikator E-Government

Tujuan Penelitian



Untuk menganalisis penerapan SISKEUDES sebagai bentuk implementasi E-Government dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Temun
Surianto Ilham dan Kadek Evi Lusiani (2022)	Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memberikan dampak positif terhadap tata kelola keuangan desa, terutama dalam pencatatan dan pelaporan yang lebih terstruktur serta sesuai regulasi. Namun, masih ditemukan kendala teknis seperti keterbatasan fleksibilitas sistem dan keterlambatan pencairan dana.
A. Faizah dan R. Sari (2022)	Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Banyudono Kecamatan Dukun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SISKEUDES mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban administrasi keuangan desa. Namun, masih terdapat hambatan teknis dalam proses penginputan data sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
B. R. Maylita dan L. Mursyidah (2025)	Penerapan SISKEUDES di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan SISKEUDES telah membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi belum berjalan optimal karena kendala infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur dan kompetensi aparatur desa agar implementasi sistem dapat berjalan lebih maksimal.

Landasan Teori

1. Content Development (Pengembangan Konten)

Indikator ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dan mengelola informasi digital yang relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pengembangan konten mencakup penyajian data, laporan, maupun layanan publik dalam bentuk digital. Konten yang baik harus informatif, transparan, dan diperbarui secara berkala agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2. Competency Building (Pembangunan Kompetensi)

Indikator ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi informasi. Keberhasilan E-Government tidak hanya ditentukan oleh adanya sistem, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan sistem tersebut secara optimal. Pelatihan, pendampingan, dan pengembangan keterampilan teknis menjadi bagian penting dalam indikator ini.

3. Connectivity (Konektivitas Infrastruktur)

Connectivity berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet, perangkat keras (hardware), dan perangkat lunak (software). Infrastruktur yang memadai dan jaringan yang stabil sangat diperlukan agar sistem digital dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan teknis.

Landasan Teori

4. Cyber Laws (Regulasi/Hukum Siber)

Indikator ini mengacu pada adanya dasar hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan. Regulasi tersebut bertujuan menjamin keamanan data, legalitas sistem, serta standar operasional dalam pelaksanaan E-Government. Tanpa dukungan hukum yang jelas, implementasi sistem digital berpotensi menimbulkan masalah administratif maupun hukum.

5. Citizen Interface (Antarmuka dengan Masyarakat)

Citizen Interface merupakan sarana interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui media digital, seperti website, aplikasi layanan publik, atau portal informasi. Indikator ini menilai sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah, cepat, dan responsif. Semakin baik antarmuka yang disediakan, semakin tinggi tingkat partisipasi dan transparansi publik.

6. Capital (Permodalan/Anggaran)

Capital berkaitan dengan ketersediaan sumber daya keuangan untuk mendukung pengembangan, pemeliharaan, dan keberlanjutan sistem E-Government. Implementasi teknologi membutuhkan biaya, baik untuk pengadaan perangkat, pelatihan SDM, maupun pembaruan sistem. Dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting agar sistem dapat berjalan secara berkelanjutan.

Metode

Jenis penelitian: kualitatif deskriptif.

Lokasi penelitian: Pemerintahan Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, kabupaten Sidoarjo

Sumber data:

- Primer: Wawancara dengan kepala desa (Bpk. Nanang), bendahara (Ibu. Ana) & kaur keuangan (Ibu Melinda), observasi langsung.
- Sekunder: Laporan APBDes tahun anggaran 2024-2025, Dokumen dan pelaporan, serta Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data:

- Wawancara: Melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan.
- Observasi: Pengamatan langsung di Pemerintahan Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo.
- Dokumentasi: mengumpulkan data pendukung seperti foto anggaran dan dokumentasi kegiatan.

Teknik analisis data:

- Reduksi data: menyederhanakan hasil wawancara menjadi data yang bermakna dan relevan dengan tujuan penelitian.
- Penyajian data: menampilkan dalam bentuk data seperti tabel agar mudah difahami.
- Penerikan kesimpulan: menarik temuan dari data yang sudah dikumpulkan.

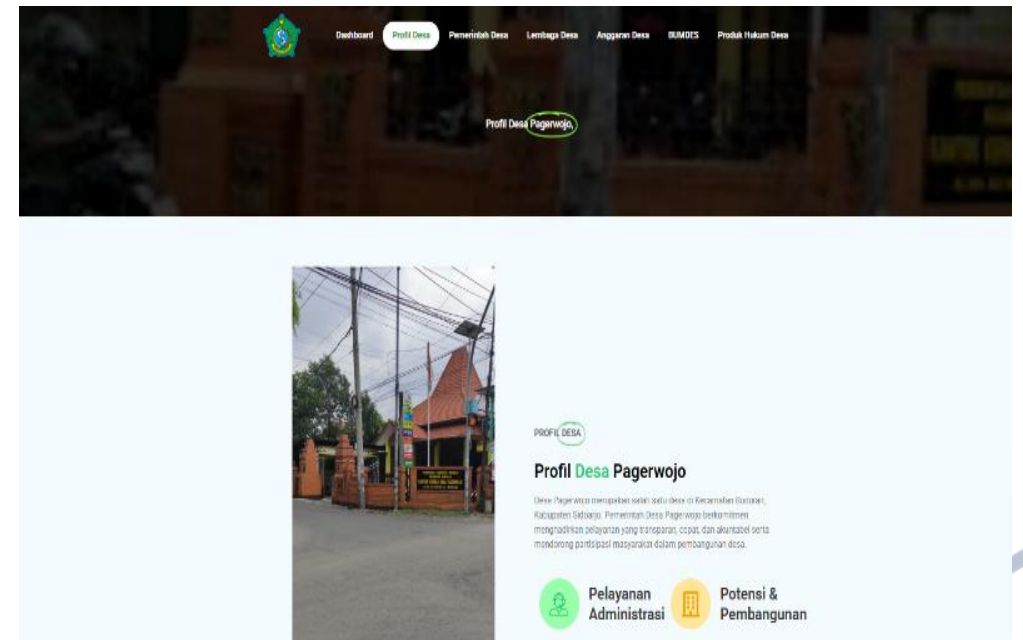
Pembahasan

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pagerwojo didasarkan pada teori E-Government menurut Richardus Eko Indrajit (2005) yang menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan ditentukan oleh enam indikator utama, yaitu Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber Laws, Citizen Interface, dan Capital. Penerapan SISKEUDES sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan desa yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Pembahasan

Content Development (Pengembangan Konten)

Pengembangan konten dalam penerapan SISKEUDES terlihat dari ketersediaan laporan APBDes yang telah diinput secara lengkap dan terstruktur dalam sistem, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Sistem ini mampu menghasilkan dokumen administrasi yang sesuai dengan regulasi dan standar pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan konsep Content Development menurut Indrajit (2005) yang menekankan pentingnya penyediaan informasi digital yang akurat dan terkelola dengan baik. Penelitian A. Faizah & R. Sari (2022) juga menyatakan bahwa SISKEUDES mampu meningkatkan ketertiban administrasi dan kualitas laporan keuangan desa.



Pembahasan

Competency Building (Pembangunan Kompetensi SDM)

Penerapan SISKEUDES di Desa Pagerwojo telah diawali dengan pelatihan bagi bendahara desa sejak tahun 2018. Namun, masih terdapat keterbatasan pemahaman teknis bagi beberapa aparatur desa yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kompetensi belum sepenuhnya optimal. Menurut Indrajit (2005), keberhasilan E-Government sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia. Jika dikaitkan dengan penelitian I. Rani (2020) juga menemukan bahwa keterbatasan kemampuan teknis menjadi faktor penghambat efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di tingkat desa.

No	Pembangunan Kompetensi SDM	Jumlah Apratur	Persentase
1	Aparatur yang telah mengikuti pelatihan	4 Orang	50%
2	Aparatur yang mampu mengoperasikan aplikasi SISKEUDES secara mandiri	2 Orang	25%
3	Aparatur yang masih bergantung pada operatur utama	3 Orang	37%
4	Aparatur yang mengalami kesulitan teknis	2Orang	25%
5	Aparatur yang memahami seluruh fitur aplikasi	2 Orang	25%

pembahasan

Connectivity (Konektivitas Infrastruktur)

Konektivitas menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi SISKEUDES di Desa Pagerwojo. Meskipun perangkat komputer telah tersedia, jaringan internet yang tidak stabil sering menghambat proses input dan pembaruan data. Indrajit (2005) menegaskan bahwa infrastruktur teknologi yang memadai merupakan persyaratan utama keberhasilan sistem digital. Jika dikaitkan dengan penelitian Surianto Ilham & Kadek Evi Lusiani (2022) juga menyebutkan bahwa kendala teknis dan infrastruktur dapat memengaruhi kelancaran dalam pengelolaan keuangan berbasis elektronik atau aplikasi.

No.	Indikator Konektivitas	Kondisi	Jumlah/Sektor	Persentase
1	Ketersediaan komputer/laptop	Tersedia	4 unit	100%
2	Perangkat dapat digunakan untuk SISKEUDES	Optimal	4 unit	100%
3	Koneksi internet tersedia Efektivitas penggunaan sistem	Ada	1 jaringan	100%
4	Efektivitas penggunaan sistem	Cukup	-	65%
5	Kesiapan infrastruktur secara keseluruhan	Cukup memadai	-	70%

Pembahasan

Cyber Laws (Regulasi/Hukum Siber)

Penerapan SISKEUDES di Desa Pagerwojo telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa aspek legalitas dan kepatuhan terhadap aturan telah terpenuhi. Indrajit (2005) menyebutkan bahwa keberadaan regulasi yang jelas menjadi fondasi penting dalam implementasi E-Government agar sistem berjalan sesuai standar hukum dan operasional. Dengan adanya regulasi tersebut, pelaporan keuangan desa menjadi lebih akuntabel dan terkontrol.

No	Indikator regulasi/Hukum siber	Kondisi	Persentase
1.	Penggunaan SISKEUDES sesuai Permendagri	Ya	100%
2.	Aparatur memahami dasar hukum SISKEUDES	Sebagian	50%
3.	Sistem memiliki fitur penguncian data posting	Ada	100%
4.	Apratur hanya mengikuti prosedur teknis	Ya	62,5%
5.	Kesalahan input dapat diperbaiki setelah posting	Tidak	0%
6.	Kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan	Tinggi	80%
7.	Sosialisasi regulasi kepada aparatur desa	Terbatas	40%
8.	Pengawasan dari pemerintahan desa	Ada	75%
9.	Risiko pelanggaran administrasi	Rendah	20%
10.	Transparansi laporan berbasis regulasi	Cukup	60%

Pembahasan

Citizen Interface (Antarmuka dengan Masyarakat)

Aspek Citizen Interface masih menjadi kelemahan dalam penerapan SISKEUDES di Desa Pagerwojo. Meskipun pengelolaan keuangan telah berbasis digital secara internal, desa belum memiliki website atau platform digital resmi untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat. Informasi masih disampaikan melalui banner atau media manual. Menurut Indrajit (2005), interaksi digital antara pemerintah dan masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan transparansi publik. Jika dikaitkan dengan Penelitian B. R. Maylita & L. Mursyidah (2025) juga menekankan bahwa keterbukaan informasi publik masih menjadi tantangan dalam implementasi SISKEUDES di tingkat desa.



Pembahasan

Capital (Permodalan/Anggaran)

Dari aspek permodalan, penggunaan dana desa telah terintegrasi dalam sistem SISKEUDES dan dicatat sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran untuk pengelolaan sistem telah tersedia. Indrajit (2005) menyatakan bahwa keberlanjutan E-Government memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai, baik untuk operasional maupun pemeliharaan sistem. Penelitian Asih & Adiputra (2022) juga menyebutkan bahwa integrasi pengelolaan dana desa melalui SISKEUDES mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LARUH BURANG (Rp)
PENDAPATAN ASLI DESA	137.000.000,00	131.000.000,00	6.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.327.433.721,00	2.318.710.507,00	8.723.214,00
DANA DESA	1.084.271.000,00	1.084.471.000,00	200.000,00
MALIKI PAJAK DAN RETENSI	634.683.779,00	630.225.977,00	4.457.802,00
ALOKASI DANA DESA	449.511.242,00	449.225.230,00	286.012,00
BANTUAN LAIN-LAIN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
PENDAPUT LAIN-LAIN	179.287.000,00	183.271.454,11	3.984.454,11
JUMLAH PENDAPATAN	7.426.921.383,00	7.426.921.383,00	0,00

Kategori	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DESA	
PENDAPATAN ASLI DESA	Rp. 141.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 3.002.036.823,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp. 88.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 3.231.836.823,00
BELANJA DESA	
BELANJA PEGAWAI	Rp. 836.966.400,00
BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 1.627.208.127,57
BELANJA MODAL	Rp. 657.119.587,83
BELANJA TAK TERDUGA	Rp. 180.000.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp. 3.301.294.115,40
PEMBIAYAAN DESA	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 69.457.292,40
SILPA TAHUN SEBELUMNYA	Rp. 69.457.292,40
PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 69.457.292,40
LEBIH DARI PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00

Kesimpulan

Penerapan SISKEUDES di Desa Pagerwojo telah terlaksana sebagai bentuk implementasi E-Government dalam pengelolaan keuangan desa dan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas administrasi keuangan. Sistem ini telah mendukung proses perencanaan hingga pelaporan secara lebih terstruktur dan sesuai regulasi. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala kompetensi SDM, infrastruktur jaringan, serta belum maksimalnya transparansi publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, perbaikan konektivitas, serta pengembangan platform digital desa guna mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara menyeluruh.

Referensi

- [1] D. Dwiyanto, "DASARHUKUM BAGI E-GOVERNMENTDI INDONESIA: STUDI PEMETAAN HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH," *J. Penelit. Huk.*, vol. 2, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022, [Online]. Available: <https://lib.unnes.ac.id/20002/>
- [2] A. Faizah and R. Sari, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun," *Jesya (Jurnal Ekon. Ekon. Syariah)*, vol. 5, no. 1, pp. 763–776, Jan. 2022, doi: 10.36778/jesya.v5i1.539.
- [3] J. M. Malahika, H. Karamoy, and R. J. Pusung, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)," *Going Concern J. Ris. Akunt.*, vol. 14, no. 1, pp. 578–583, 2018, doi: 10.32400/gc.13.04.21514.2018.
- [4] K. G. Asih and I. M. P. Adiputra, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi)*, vol. 13, no. 1, pp. 12–23, 2022.
- [5] S. I. K. E. LUSIANI, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. (Surianto Ilham; Kadek Evi Lusiani)," 2022.
- [6] I. Rani., "EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA KERTAK EMPAT KECAMATAN PENGARON," 2020.
- [7] B. R. Maylita and L. Mursyidah, "Implementation of Siskeudes in Tambak Kalisogo Village , Jabon District , Sidoarjo Regency," *Int. Conf. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 2, no. 2, pp. 2800–2809, 2025.
- [8] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, no. January, 2017.
- [9] Dwi Nurrahmawati, Yianne Gabriela Sriyanto, and Nuwun Priyono, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Rejosari Kecamatan Pakis," *Pop. J. Penelit. Mhs.*, vol. 2, no. 2, pp. 101–115, 2023, doi: 10.58192/populer.v2i2.856.
- [10] W. D. Fristanti and I. U. Choiriyah, "Efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengembangan Government to Government (G2G) Di Desa Dukusari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 14, no. 1, pp. 12–29, 2025, doi: 10.33366/jisip.v14i1.3218.
- [11] M. Rahmayu and Y. Siantono, "Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskuedes) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model Di Kecamatan Bakauheni," *JUTIM (Jurnal Tek. Inform. Musirawas)*, vol. 8, no. 2, pp. 131–141, 2024, doi: 10.32767/jutim.v8i2.2067.
- [12] A. E. Liata, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar," *Ilmu Sos. dan Ilmu Pemerintah.*, p. 101, 2021.
- [13] Muna Nurmalinda and Muhammad Riyandi Firdaus, "Open Government Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Kantor Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong," *Japb*, vol. 7, no. 2, pp. 1800–1815, 2024, doi: 10.35722/japb.v7i2.1118.
- [14] F. F. Satrio, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak," *JPASDEV J. Public Adm. Sociol. Dev.*, vol. 1, no. 2, p. 111, 2020, doi: 10.26418/jpasdev.v1i2.43439.
- [15] Muhammad Leo Adi Saputra, "Implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di kecamatan muara sugihan menggunakan metode Black Box Testing," *Indones. J. Data Sci.*, vol. 2, no. 3, pp. 148–157, 2021, doi: 10.56705/ijodas.v2i3.57.

